

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Almilia dan Wijiyanto (2007), kinerja perusahaan yang secara relatif berubah-ubah dari tahun ke tahun dalam suatu kelompok industri yang bergerak dalam usaha yang sama (industri sejenis) yang ditandai dengan besarnya return tahunan perusahaan disebut dengan kinerja ekonomi perusahaan. Yang mana, kinerja ekonomi yang baik dapat menggambarkan peningkatan keberhasilan produktivitas suatu perusahaan yang baik pula. Hal tersebut dapat dengan jelas diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja ekonomi baik dapat menunjang sebuah perusahaan untuk meraih tujuan jelas didirikannya perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk menarik investor agar berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Namun, dengan meningkatnya produktivitas perusahaan, banyak perusahaan yang lalai akan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas produksinya. Dewasa ini, fenomena permasalahan lingkungan di Indonesia terjadi disebabkan dari dampak buruknya pengelolaan lingkungan yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan sebagai bukti rendahnya perhatian

perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari aktivitas industrinya.

Oleh karena itu, masyarakat menuntut kepada perusahaan untuk memperhatikan secara khusus dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan produksi perusahaan. Hasilnya, perusahaan menanggapi dengan baik tuntutan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan peduli lingkungan yang terprogram. Kegiatan atas peduli lingkungan tersebut dicatat secara khusus sebagai anggaran yang secara tidak langsung akan mendatangkan benefit bagi perusahaan itu sendiri. Konsep tersebut sering disebut sebagai akuntabilitas lingkungan. Akan tetapi, penerapan akuntabilitas lingkungan di negara berkembang masih sangat kurang termasuk salah satunya di Indonesia. Hal itu dikarenakan lemahnya sanksi hukum yang berlaku di Indonesia terhadap permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh sebuah perusahaan.

Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong peningkatan peran perusahaan dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup yaitu melalui dibentuknya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang telah dimulai sejak tahun 2002. PROPER Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2017) ini membantu penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi yang dilakukan melalui berbagai pengarahan kegiatan yang bertujuan untuk: (i) mendorong perusahaan agar menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong

perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

Dengan dibuatnya PROPER di atas, maka diharapkan agar perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidupnya dapat memenuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan secara lengkap dan menyeluruh. Sehingga, program ini sangat diharapkan mampu menurunkan kualitas dampak lingkungan hingga mencapai di bawah baku mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan terkait. Sesuai dengan pendapat Suratno, dkk (2006) bahwa kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). Ditambah berdasarkan Rakhiemah dan Agustian (2009), kinerja lingkungan perusahaan diukur menggunakan warna. Beberapa warna itu yaitu warna emas, yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksinya. Sedangkan bagi perusahaan yang lebih dari cukup dalam pelaksanaan sistem pengolahan lingkungannya, diberikan warna hijau. Berbeda lagi dengan perusahaan yang telah melakukan upaya pengolahan lingkungan, yaitu diberikan warna biru. Selanjutnya, warna merah diperuntukkan kepada perusahaan yang mengupayakan pengolahan lingkungan, akan tetapi masih belum sesuai dengan persyaratan yang telah diatur. Terakhir, yang terburuk adalah warna hitam yaitu diperuntukkan bagi perusahaan yang melakukan kelalaian dalam proses produksinya sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan. Alhasil, melalui program ini, masyarakat akan lebih mudah dalam mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada tiap masing-masing perusahaan.

Adanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tersebut sejatinya tak pernah lepas dalam berhasilnya upaya pengelolaan kinerja lingkungan hidup. *Good Corporate Governance* merupakan susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002). *Good Corporate Governance* dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang efisien dalam perusahaan.

Akuntabilitas sebagai aspek dari *Good Corporate Governance* (GCG) sangatlah penting ketika manajemen menghadapi pilihan antar waktu (*intertemporal choice*). Hal ini berkenaan dengan bagaimana keadaan itu memaksa manajemen perusahaan melakukan manipulasi karena situasi yang dihadapinya, untuk dapat mengelola pengeluaran-pengeluaran yang akan memberikan manfaat di masa depan. Dengan tujuan menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan dengan mengubah laporan keuangan, atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkannya, adalah beberapa contoh bagaimana melakukan manipulasi tersebut berdasarkan Watts dan Zimmerman (1986). Sehingga dengan sebab itu, manajemen atau perusahaan perlu membentuk komite audit untuk menghindari manipulasi seperti tersebut di atas.

Salah satu komponen dalam pelaksanaan GCG yang efektif dapat terwujud yaitu dengan adanya komite audit yang berkualitas dalam sebuah perusahaan. Yang mana, tugas dan tanggung jawab dari komite audit adalah untuk

memastikan prinsip-prinsip GCG yang berkaitan dengan transparansi dan pengungkapan telah diterapkan secara konsisten dan memadai. Penerapan prinsip ini berkaitan dengan integritas laporan keuangan, yaitu antara lain nantinya dapat terlihat dari ketiadaan permasalahan penyajian laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa permasalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik dapat dilihat dari adanya sanksi dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Selain itu, di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan hubungan positif antara kehandalan laporan keuangan dengan kualitas *Good Corporate Governance*. Karena berdasarkan pendapat dari Dechow *et al* (1996), kecurangan laporan keuangan lebih mungkin didapati pada perusahaan tanpa komite. Dan juga dijelaskan oleh Anderson *et al* (2003) bahwa komite audit yang berkualitas mampu melakukan manajemen laba dalam perusahaan sehingga pendapatan perusahaan bisa meningkat.

Di samping itu, Siallagan dan Machfoedz (2006) juga menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komite audit mampu meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui beberapa hal ini: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasil dari hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu pada: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat,

(2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Untuk mengetahui kinerja ekonomi perusahaan dengan tepat, banyak sekali teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan dipakai oleh kalangan pemilik modal maupun para manajer perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam *return* harga saham perusahaan. Melalui fluktuasi harga saham perusahaan, pencapaian kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat dari respon positif investor. Sehingga, merupakan *good news* bagi investor dan calon investor apabila perusahaan itu memiliki *track record* dengan kinerja lingkungan yang baik. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Suratno, dkk (2006) yang menemukan pengaruh signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi dalam suatu perusahaan.

Investor atau calon investor menggunakan laporan tahunan sebagai pedoman dalam melihat prospek perusahaan. Pengungkapan informasi yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan dapat memberikan analisa laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Sebagian besar pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan memuat informasi sosial mengenai tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat. Alasan pengungkapan yang dilakukan perusahaan terhadap informasi sosial merupakan subjek yang banyak diambil dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Epstein & Freedman (1994) dan dalam penelitian milik Lindrianasari (2007). Selain itu, dapat diketahui bahwa menurut Daegan & Rankin (1997) dalam penjelasan yang dipaparkan dalam laporan hasil

penelitian Lindianasari (2007), menerangkan bahwasanya kebanyakan dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa responden akan melakukan tindakan yang berbeda terhadap keputusan investasi pada kondisi mereka memperoleh informasi sosial dan pada kondisi tidak memperoleh informasi sosial.

Dijelaskan oleh Gray (1993) dalam Lindrianasari (2007), yaitu bahwa pengungkapan lingkungan merupakan bagian dari pengungkapan laporan keuangan. Banyak studi yang menguji lebih lanjut tentang informasi sosial yang dihasilkan oleh perusahaan dan ditemukan bahwa informasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari informasi tersebut. Lebih jauh lagi, Gray menyatakan pengungkapan lingkungan merupakan bagian esensi terpenting dari suatu laporan keuangan.

Pelaporan lingkungan dalam *annual report* di sebagian besar negara termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*. Meskipun begitu, kewajiban pelaporan mengenai dampak lingkungan di Indonesia telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dan diatur juga di dalam Undang- Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Review yang dilakukan oleh Berthelot, *et al*, pada tahun 2003 menunjukkan bahwa penelitian mengenai hubungan antara pengungkapan lingkungan dengan kinerja keuangan cukup banyak dilakukan. Diterangkan bahwa beberapa peneliti pada umumnya menggunakan variabel kinerja keuangan atau pasar modal sebagai prediktor bagi kinerja lingkungan atau pengungkapan

lingkungan itu sendiri. Sedangkan di Indonesia sendiri, penelitian yang menguji hubungan kedua variabel telah dilakukan oleh Sarumpaet pada tahun 2005. Dari hasil investigasi penelitian terdahulu tersebut, nampak bahwa penelitian yang menggunakan variabel non keuangan sebagai prediktor kinerja lingkungan masih dilakukan. Disamping itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kinerja lingkungan dalam annual report juga masih sangat jarang dilakukan (Berthelot, *et al*, 2003). Dalam penelitian Siregar, Lindrianasari dan Komaruddin (2013) mengujikan hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja komite audit dengan kualitas pengungkapan CSR menunjukkan signifikansi diantara variabel yang ada.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, pengaruh kinerja lingkungan dalam perusahaan dan komite audit terhadap hasil kinerja ekonomi perusahaan sangat menarik untuk diteliti agar para investor atau calon investor mampu mempertimbangkan aspek tersebut dalam keputusan berinvestasinya, dan juga diharapkan dapat meningkatkan peran perusahaan akan pentingnya kesadaran perusahaan akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, pengujian ulang tentang hal tersebut akan dilakukan oleh penulis yang hasilnya akan dipaparkan dalam laporan penelitian yang diberi judul “***Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit terhadap Kinerja Ekonomi Perusahaan***” ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan?
2. Apakah kinerja komite audit berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh antara kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh antara kinerja komite audit dengan kinerja ekonomi perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembuktian dari teori tersebut.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya yang nantinya dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan itu sendiri.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan penelitian terdahulu, yaitu yang berjudul *“Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit dengan Kualitas Pengungkapan CSR”* yang telah dilakukan oleh Lindrianasari Siregar dan Komaruddin pada tahun 2013. Dengan mengganti variabel dependen dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan. Penggantian variabel dilakukan karena terdapat keterbatasan indikator pengungkapan CSR. Kinerja ekonomi perusahaan diukur menggunakan perhitungan skala hitung *economic performance* Al-Tuwaijri yang merujuk pada penelitiannya di tahun 2004 yang memiliki judul *“The Relations Among Environmental Disclosure, Environmental Performance, and Economic Performance: A Simultaneous Equations Approach”*.